

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan yuridis terhadap pengurusan piutang negara hasil penyerahan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang pengurusannya dilakukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V. Dari pembahasan tersebut, akan diketahui apakah pengurusan piutang negara hasil penyerahan Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016, serta kendala dan masalah apa saja yang terjadi selama proses pengurusan piutang negara tersebut. Jenis data yang digunakan dalam karya tulis ini menggunakan data kualitatif. Yang disusun dengan sumber data primer berupa wawancara dan sumber data sekunder berupa jurnal, buku, dan arsip-arsip terkait pengurusan piutang negara. Dari penelitian yang dilakukan, didapat hasil peninjauan bahwa pengurusan piutang negara hasil penyerahan Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah sesuai dengan PMK Nomor 240/PMK.06/2016 meskipun masih belum sepenuhnya berjalan lancar serta masih terdapat kendala dan permasalahan dalam pengurusannya. Salah satu permasalahan yang umum terjadi yaitu tidak adanya barang jaminan dalam pengurusan piutang negara.

Kata Kunci: Piutang Negara, Kementerian Koinfo, KPKNL Jakarta V

Abstract

This study aims to conduct a juridical review of the management of state receivables resulting from the submission of the Ministry of Communication and Information Technology which is processed at the Jakarta V State Wealth and Auction Service Office. From the discussion, it will be known whether the management of state receivables from the Ministry of Communication and Information Technology is in accordance with the Minister of Finance Regulation Number 240/PMK.06/2016, as well as what obstacles and problems occur during the process of managing state receivables. The type of data used in this paper uses qualitative data. Compiled with primary data sources in the form of interviews and secondary data sources in the form of journals, books, and archives related to the management of state receivables. From the research conducted, it was found that the management of state receivables resulting from the transfer of the Ministry of Communication and Information Technology was in accordance with PMK Number 240/PMK.06/2016 although it was still not fully running smoothly and there were still obstacles and problems in its management. One of the common problems is the absence of collateral in the management of state receivables.

Keywords: State Receivables, Ministry of Communication and Information Technology, KPKNL Jakarta V